

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sitti Mispa^{1✉} Nuramal

^{1,2} STIEM Bongaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling. Populasinya adalah seluruh OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 48 OPD, sedangkan sampel yang diambil berjumlah 50 responden. Hasil kuesioner tersebut telah di uji validitas dan reliabilitasnya, dan uji normalitasnya. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian berdasarkan hasil Uji t pada variabel sistem pengendalian intern nilai t-hitung sebesar 2.299 lebih besar dari t-tabel yaitu 2.008. Hal ini menunjukkan Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, maka sistem pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil Uji t pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan menghasilkan t- hitung -1.248 lebih kecil dari t-tabel yakni 2.008. Hal ini menunjukkan Ho2 diterima dan Ha2 ditolak, maka sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian berdasarkan hasil Uji t pada variabel kompetensi sumber daya manusia nilai t-hitung sebesar 6.984 lebih besar dari t-tabel yaitu 2.008. Hal ini menunjukkan Ha3 diterima dan Ho3 ditolak, maka kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: *Kualitas Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia.*

Copyright (c) 2022 Verawaty

✉ Corresponding author :

Email Address : verawatybknnitro@gmail.com

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem Akuntansi Pemerintah berperan sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi di Pemerintahan, merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan

pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.

Sorotan utama pada organisasi sektor publik di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dimana akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh entitas pelapor atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala. Dengan demikian, dengan adanya akuntabilitas publik, baik pemerintah daerah maupun pusat harus dapat mempertanggung jawabkan seluruh pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan hasil yang baik tidak hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga dengan bukti secara fisik berada di wilayah kota/provinsi.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara juga harus mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Pertanggungjawaban haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah juga harus diaudit. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) sebagai auditor eksternal. (Handayani, 2012)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas laporan keuangan haruslah memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas, membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan yang bernilai ekonomis. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Darise, 2008:2). Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintahan daerah adalah melalui laporannya. Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2018).

Keterkaitan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan

oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi, yang dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena suatu kegiatan operasional memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu membatasi dan mengkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Suatu organisasi termasuk pemerintah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap kegiatan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka segala kegiatan terutama di bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pelaporan keuangan memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban, manajerial, hingga pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan, apabila laporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik yang artinya memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, sesuai dengan pedoman, hingga dalam bentuk dan waktu yang tepat, maka kualitas dari laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi menurut (Mardiasmo, 2018) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi syarat tepat waktu agar memenuhi kriteria laporan keuangan yang sudah relevan. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai di bidang akuntansi. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya yang mengerti akan prinsip-prinsip pelaporan keuangan, membuat kualitas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan (Kurniawan, 2019).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil kerja yang dilakukan oleh seorang auditor atau pemeriksa sangat berpengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pemerintah. Pemeriksaan atas LKPD yang dilakukan oleh BPK yang mengacu dalam sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini. BPK mengeluarkan empat macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Pratiwi & Aryani, 2017).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah 10 tahun berturut-turut meraih WTP (Sumber: www.makassar.terkini.id diakses 11 Maret 2022). Terdapat tiga penyebab Sulawesi Selatan hanya meraih opini WDP.

Yang pertama yang menjadi temuan yaitu bantuan keuangan daerah ke kabupaten/kota yang disalurkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Sulawesi Selatan melampaui anggaran yang disajikan di laporan keuangan. Masalah kedua, terjadinya kekurangan kas atau kas tekor di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum disetorkan ke kas daerah, sebenarnya masih ada saldo kas tetapi uang tersebut sudah tidak ada. Ketiga, ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan namun tidak disetor ke kas daerah tetapi digunakan untuk kegiatan lain.

Berdasarkan uraian diatas, keterkaitan fenomena dan variabel dalam penelitian dapat dilihat dengan tidak diterapkannya karakteristik kualitatif laporan keuangan dan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Seperti ada anggaran perubahan yang tidak diketahui oleh DPRD, ini menunjukkan kualitas laporan keuangan belum andal karena terdapat kesalahan material dan tidak jujur dalam informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangannya. Dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Kemudian masalah kekurangan kas atau kas tekor di tiga OPD, hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak relevan karena catatan kas tidak menggambarkan kondisi aktual dimana pada pembukuan kas masih terdapat saldo, sementara fisik uang tidak tersedia. Relevan merupakan sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Serta penerimaan pajak yang semestinya disetor ke kas negara tapi malah digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada anggarannya atau tidak sesuai ketentuan. Permasalahan ini menunjukkan kualitas laporan keuangan tidak andal karena tidak jujur dalam menyampaikan informasi terkait laporan penerimaan pajak. Informasi dapat diandalkan apabila penyajian yang disajikan jujur atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern diperlukan guna mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa menggambarkan kinerja yang baik dari masing-masing pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yakni suatu prosedur yang terintegrasi pada perbuatan dan aktivitas yang dilaksanakan berulang kali oleh atasan serta semua staf tenaga kerja dalam memberikan kepastian memadai atas tergapainya target organisasi dengan aktivitas atau tindakan yang efektif dan baik, ketaatan pelaporan keuangan, perlindungan aset Negara dan ketaatan pada aturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan yang dibuat dan dihasilkan oleh instansi pemerintah juga dipastikan atas seberapa baik sistem pengendalian intern yang diterapkan. Adapun hasil riset dari Triono & Dewi, (2020) serta Aditya & Surjono, (2017) membuktikan jika Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H1 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistem Akuntansi Daerah adalah rangkaian prosedur yang dilakukan mulai dari mengumpulkan, mencatat, menggolongkan, dan meringkas serta melaporkan transaksi. Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diatur Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, sehingga dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik dan benar dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun riset dari Pujanira, (2017) serta Jauhari dkk., (2021) menghasilkan hasil yakni SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang belum dapat dikatakan memahami penyusunan laporan keuangan jika belum memahami akuntansi. Pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dibutuhkan untuk dapat mengelola informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas. Hasil riset dari Gita Saraswati & Budiasih, (2019) dan Karsana & Suaryana, (2017) menghasilkan hasil yaitu kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah. Sugiyono, (2018:35-36) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang bertandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian menguji hipotesis dan berdasarkan tipe hubungan variabel yang diteliti tergolong penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan di seluruh dinas di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapaun waktu yang

digunakan dalam penelitian ini kurang lebih tiga bulan yang akan dimulai pada bulan Maret sampai dengan Mei 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a.Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (corrected item total corelation) dengan r tabel sebesar 0,30. Jika r hitung $>$ r tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia. Dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R Tabel	Keterangan
SISTEM PENGENDALIA NINTERN (X1)	1	0,309	0,30	Valid
	2	0,105	0,30	Valid
	3	0,459	0,30	Valid
	4	0,370	0,30	Valid
	5	0,312	0,30	Valid
	6	0,563	0,30	Valid
	7	0,518	0,30	Valid
	8	0,406	0,30	Valid
	9	0,326	0,30	Valid
	10	0,186	0,30	Valid
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (X2)	1	0,278	0,30	Valid
	2	0,521	0,30	Valid
	3	0,588	0,30	Valid
	4	0,628	0,30	Valid
	5	0,396	0,30	Valid
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (X3)	6	0,638	0,30	Valid
	1	0,358	0,30	Valid
	2	0,451	0,30	Valid
	3	0,707	0,30	Valid
	4	0,341	0,30	Valid
	5	0,606	0,30	Valid
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)	6	0,560	0,30	Valid
	1	0,432	0,30	Valid
	2	0,641	0,30	Valid
	3	0,331	0,30	Valid
	4	0,397	0,30	Valid
	5	0,309	0,30	Valid
	6	0,354	0,30	Valid
	7	0,273	0,30	Valid
	8	0,515	0,30	Valid

Sumber: Data SPSS diolah, 2022

diatas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel yaitu 0.30. Dengan demikian, semua indikator tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji instrument penelitian dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) $> r$ tabel sebesar 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	R tabel	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	0,273	0,60	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,441	0,60	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,428	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,309	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan variabel penelitian baik variabel bebas (Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia) maupun variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) dinyatakan reliabel karena diperoleh nilai cronbach's alpha lebih besar dibandingkan dengan r tabel sebesar 0,60. Nilai cronbach's alpha Sistem Pengendalian Intern adalah 0,273, nilai cronbach's alpha Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah 0,441, nilai cronbach's alpha Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 0,428 dan nilai cronbach's alpha Kualitas Laporan Keuangan adalah 0,309.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa H1 diterima yang berarti secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan. Dapat disimpulkan jika sistem pengendalian berjalan dengan efektif maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pada pemerintah Prov. Sulawesi Selatan Hal ini dapat diketahui bahwa dalam lingkungan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan telah menerapkan SPI secara optimal karena sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena suatu kegiatan operasional memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu membatasi dan mengkoordinisasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah akan memberikan arah kontrol yang baik bahwa standar akuntansi pemerintah dilaksanakan sebagaimana

mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah bisa tercapai sesuai yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori mulyadi (2001:163) yang menyatakan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian internal harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indrayani & Widiastuti, (2020) dan Hartono & Ramdany, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Anggie dkk, (2021) dan juga Purba, (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa H2 ditolak yang berarti menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan. Dapat disimpulkan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah, lemahnya penerapan sistem akuntansi keuangan dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Dalam hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang besar terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah, yang artinya pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam penyusunan laporan keuangan sudah baik namun bukan menjadi tolak ukur untuk menentukan baik atau buruknya kualitas laporan keuangan, namun berdasarkan jawaban kuesioner masih terjadi pencatatan yang dilakukan secara tidak kronologis, hal ini juga dapat memengaruhi kualitas dari laporan keuangan karena apabila semua komponen-komponen dilakukan dengan baik maka hal tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wiranto, (2020) Wulandari & Rahmat, (2020) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan menolak hasil penelitian yang telah dilakukan oleh I Gusti & Putu Eka, (2020) dan Hanifa, (2019) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa H3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan. Dapat

disimpulkan jika sumber daya manusia yang kompeten akan sangat membantu dalam menjalankan tugasnya yaitu penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. SDM yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai dengan tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019). Kompetensi SDM dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan dan terhindar dari kesalahan pencatatan maupun perhitungan. SDM yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan sesuai dengan waktunya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Moenitha, (2018) dan Lubis, (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan menolak hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Animah dkk., (2020) dan Wijayanti, (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Referensi:

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49.
<https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Andriani, P., Suarsa, A., & Yuniati. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirtawening Kota Bandung. 1, 26–41.
- Animah, Bayu, S. A., & Astuti Widia. (2020). Vol. 5, No. 1, Oktober 2020. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN Animah1), 5(1), 99–109.
- Darise, N. (n.d.). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).
- Dasmaran, V.-, Yulaeli, T.-, & Selfiani, - -. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 170–178. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1082>
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS (8th ed.). Badan

- Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita Saraswati, I. G. A., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2268.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p23>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 53–64.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Handayani, D. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(12), 12–16.
<http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/03068290910996981%0Ahttps://journal.pcr.ac.id/paper/GoodGovernancedanKualitasLaporanKeuanganPemerintah.pdf>
- Hanifa, L. (2019). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengendalian Intern Pada Skpd Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas ..., 5, 38–45. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/969%0Ahttps://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/download/969/634>
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh Sap, Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23.
- Hutahaean, J. (2014). Konsep Sistem Informasi. Deepublish Publisher.
- I Gusti, & Putu Eka. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 137–147.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 115 (2004).
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Jauhari, H., Dewata, E. D., & Suhairi Hazisma. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2569>
- Jultri, A., Made, A., & Wirshandono Y., D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5449>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, (2001).
- Komarasari, W. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Akuntansi*.
- Kurniawan, I. S. (2019). Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. *KINERJA :Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 16(2), 160–165.

- Listiyani, S., & Gunawan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar.
- Lubis, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Pada SKPD Kota Medan). Universitas Sumatera Utara Medan. (1st ed.). Andi Yogyakarta.
- Michael C. Jensen, & William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. In *Journal of Finance Economic*. <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>
- Moenitha, I. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya). Universitas Pasundan Bandung.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Going Concern*, 12(2).
- Mulyadi. (2014). *Auditing Buku 2* (6th ed.). Salemba Empat. Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Nasruddin, M. (2021, May 28). 10 Tahun Berturut-Turut Raih WTP, Tahun 2020 Sulsel Gagal Hanya Dapat Opini WDP. <https://makassar.terkini.id/10-tahun-berturut-turut-raih-wtp-tahun-2020-sulsel-gagal-hanya-dapat-opini-wdp/>
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, (2013).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhi, (2002).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, (2013).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, (2018).